

BAB IV

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan masyarakat sipil Nairobi dalam memaksa penarikan Finance Bill 2024 tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh sinergi kuat antara dua elemen utama: mobilisasi digital terdesentralisasi yang dijelaskan oleh teori Connective Action, dan terbukanya celah dalam struktur politik yang dianalisis melalui kerangka Political Opportunity Structure (POS). Interaksi antara kekuatan internal gerakan yang berbasis digital dan kerentanan eksternal pemerintah inilah yang menciptakan tekanan yang tak tertahankan.

Dari sisi Connective Action, gerakan ini secara efektif beroperasi sebagai crowd-enabled network yang digerakkan secara organik oleh Generasi Z tanpa kepemimpinan formal. Keberhasilannya dimotori oleh penyebaran personal action frames, narasi-narasi personal mengenai dampak RUU yang menerjemahkan isu teknokratis menjadi penderitaan kolektif. Gerakan ini secara strategis memanfaatkan ekosistem media digital, menggunakan X untuk amplifikasi massal, TikTok untuk edukasi populis, Instagram untuk membangun narasi visual, dan WhatsApp untuk koordinasi logistik di lapangan. Mekanisme algoritma platform-platform ini mempercepat penyebaran pesan dan menempa identitas kolektif, mengubah keluhan individual menjadi kekuatan politik yang kohesif.

Namun, energi digital ini tidak akan cukup tanpa adanya Political Opportunity Structure yang menguntungkan. Temuan penelitian mengidentifikasi tiga peluang krusial. Pertama, adanya perpecahan elite yang nyata di tingkat eksekutif antara Presiden dan Wakil Presiden serta oposisi vokal di parlemen. Kedua, dukungan vital dari institutional allies seperti Law Society of Kenya (LSK) yang menyediakan bantuan hukum dan Komisi HAM yang melegitimasi narasi pelanggaran oleh negara. Ketiga, backfire effect yang kuat, di mana represi negara yang brutal justru memicu kemarahan moral yang lebih besar, memperkuat solidaritas, dan menarik kecaman internasional.

Sinergi antara kedua kerangka teori inilah yang menjadi puncak analisis. Aksi digital tidak hanya terjadi di ruang hampa, tetapi secara aktif mengeksplorasi peluang politik yang ada. Video kekerasan aparat menjadi viral dan mengamplifikasi backfire effect, sementara platform media sosial digunakan untuk memperkuat suara sekutu dan mengekspos perpecahan elite. Tekanan ganda dari mobilisasi massa di jalanan dan kecamaran internasional di panggung global pada akhirnya memaksa pemerintah untuk menyerah. Keberhasilan substantif gerakan ini terwujud dalam sebuah policy outcome yang konkret: pernyataan Presiden William Ruto yang secara resmi menarik kembali Finance Bill 2024.

Studi kasus ini memiliki relevansi yang kuat dalam kajian Hubungan Internasional. Ini menunjukkan bagaimana aktor non-negara yang terdesentralisasi mampu menantang kedaulatan negara dalam pembuatan kebijakan domestik melalui pemanfaatan platform teknologi global. Keberhasilan gerakan ini juga menjadi contoh difusi norma dan taktik perlawanan lintas batas di era digital, yang berpotensi menginspirasi gerakan serupa di negara lain. Pada akhirnya, kasus ini menggarisbawahi pergeseran kekuatan dalam politik global, di mana gerakan sosial yang digerakkan secara digital menjadi aktor yang semakin efektif dan patut diperhitungkan dalam lanskap hubungan internasional kontemporer.

Meskipun demikian, penelitian ini juga membuka sejumlah agenda riset di masa depan. Pertama, meskipun integrasi teori Connective Action dan Political Opportunity Structure terbukti mampu menjawab pertanyaan penelitian, studi lanjutan diperlukan untuk mengidentifikasi potensi 'celah' (gap) teoretis atau menguji variabel-variabel lain yang tidak tercakup dalam analisis ini. Kedua, secara praktis, temuan ini menawarkan preseden penting. Di tengah banyaknya catatan kegagalan gerakan sosial di kawasan Afrika, keberhasilan protes Finance Bill 2024 dapat menjadi model empiris bagi aksi kolektif lain dalam merumuskan strategi untuk mencapai policy outcome yang substantif. Ketiga, analisis masa depan dapat diperdalam melalui perspektif Ekonomi Politik Internasional, dengan mengkaji bagaimana konstelasi utang luar negeri Kenya menjadi faktor determinan

yang tidak hanya membentuk kebijakan domestik yang kontroversial, tetapi juga berimplikasi pada penyempitan ruang gerak kebijakan luar negeri negara tersebut.

